

IMPELEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI MELALUI ELEKTRONIK GOTONG ROYONG DI KOTA TANJUNGPINANG

IMPLEMENTATION OF NON-CASH FOOD ASSISTANCE THROUGH ELECTRONIC MUTUAL ASSISTANCE IN TANJUNG PINANG CITY

Ristiana Pramesti, Adji Suradji Muhammad, Dian Prima Safitri
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Ristianapramesti@gmail.com

Abstrak

Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp. 110.000 melalui Mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di warung yang bekerja sama dengan Bank Himbara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Kota Tanjungpinang serta mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi E-Warong dalam mendistribusikan BPNT di Kota Tanjungpinang. Informan yang digunakan dalam penelitian ini Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, pengelola E-Warong Kota Tanjungpinang serta KPM. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model Implementasi Van Meter dan Van Horn dengan menggunakan enam indikator. Hasil penelitian dilihat dari indikator yang dipakai yaitu 1) Standar dan tujuan kebijakan kurang optimal, dapat dilihat dari tujuan yang dicapai belum maksimal dalam memberdayakan KPM, 2) Sumber daya yang ada kurang berjalan yakni para pelaksana dan sarana prasarana masih memiliki hambatan, 3) Karakteristik Organisasi program E-Warong belum optimal karena terhambat dalam pendataan calon KPM, 4) sikap pelaksana dari pihak Bank belum sepenuhnya bertanggungjawab dengan tugasnya, 5) komunikasi antar organisasi pelaksana cukup optimal dengan mengadakan rapat disetiap pelaksanaan program, 6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik sudah optimal dapat dilihat dari masyarakat sosial sudah mendukung akan adanya program ini. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi BPNT melalui E-Warong di kota Tanjungpinang sudah optimal, hanya saja masih terdapatnya saldo dari KPM yang kosong. Serta kurang berdayanya KPM dalam menjalankan program E-Warong karena harus bersaing dengan pihak swasta yakni agen Bank himbara (BNI). Saran peneliti kepada pemerintah Kota Tanjungpinang agar mengeluarkan kebijakan perlunya rekomendasi Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam

pendirian agen Bank sebagai tempat transaksi bantuan pangan sosial nontunai agar dapat dengan mudah mengontrol, serta mendata kembali masyarakat yang ada dikota Tanjungpinang untuk lebih bijak dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan agar manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Kata Kunci : Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong), implementasi

ABSTRACT

The Non-Cash Food Assistance Program is food assistance from the government that is given to the Beneficiary Families (KPM) of Rp. 110,000 through the Electronic account mechanism used only to buy food in stalls that work with Bank Himbara. The purpose of this study was to find out the Implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) through the Gotong Royong (E-Warong) Electronic Shop in Tanjungpinang City and find out the factors that influenced the implementation of E-Warong in distributing BPNT in Tanjungpinang City. The informants used in this study were the Tanjungpinang City Social Service, the manager of the E-Warong of Tanjungpinang City and KPM. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Technique and data collection through observation, interviews, and documentation. This study uses the Van Meter and Van Horn Implementation model using six indicators. The results of the study are seen from the indicators used, namely 1) The standard and policy objectives are not optimal, can be seen from the objectives that have not been maximized in empowering KPM, 2) The existing resources are less running, the implementers and infrastructure still have obstacles, 3) Characteristics The organization of the E-Warong program is not optimal because it is hampered in the data collection of prospective KPM, 4) the attitude of the executor from the Bank is not fully responsible with its duties, 5) communication between implementing organizations is optimal by holding meetings in each program implementation, 6) economic, social and political environment already optimal can be seen from the social community already supporting this program. The conclusion of this study shows that the implementation of BPNT through E-Warong in Tanjungpinang city has been optimal, except that there is still a balance of empty KPM. As well as the lack of empowerment of KPM in running the E-Warong program because it has to compete with the private sector, namely the agent of Bank Himbara (BNI). The suggestion of researchers to the Tanjungpinang City government to issue a policy is the need to recommend the Tanjungpinang City Social Service in establishing Bank agents as a place for non-cash social food assistance transactions in order to easily control, and re-record

the communities in Tanjungpinang to be wiser in utilizing the assistance provided to benefit the program can be felt in the long run.

Keywords: Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Electronic Warung Gotong Royong (E-Warong), implementation

A. Pendahuluan

Penelitian ini ingin mengkaji Implementasi dalam program pengentasan kemiskinan yaitu bantuan pangan nontunai (BPNT) melalui elektronik warung gotong royong (E-Warong) di Kota Tanjungpinang. Banyak aktor-aktor yang berperan dalam proses pelaksanaan BPNT maupun E-Warong. Fokus penelitian ini pada proses pelaksanaan E-Warong dalam mendistribusikan BPNT. Program BPNT ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai. Program ini juga dalam rangka mendukung SNKI sesuai Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. E-Warong merupakan program pemerintah untuk pencairan dana bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dengan sistem nontunai, yang memanfaatkan teknologi jaringan internet sekaligus sebagai sarana memperlancar BPNT.

Terdapat sebanyak 8.450 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan bantuan sosial di Kota Tanjungpinang. Jumlah E-Warong yang ada di Kota Tanjungpinang saat ini sebanyak 12 E-Warong yang

terbagi atas 4 Kecamatan. E-Warong ini menyebar di beberapa kelurahan. Dari 8.450 KPM yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, masih ada sekitar 744 KPM yang tidak menggunakan manfaat dari program BPNT, hal ini yang mengakibatkan beberapa pengelola E-Warong melaporkan pada dinas sosial Kota Tanjungpinang tentang masih banyaknya masyarakat yang tidak mengambil bagian dari penerima manfaat dari program BPNT tersebut serta adanya indikasi para KPM yang sudah tidak memenuhi syarat yang kemudian menjadikan data para KPM harus diperbarui serta disesuaikan dengan data terkini, yang membuat kurangnya koordinasi para pelaksana. Pemerataan E-Warong antara satu dengan lainnya belum merata disejumlah tempat.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi bantuan pangan non tunai melalui elektronik warung gotong royong yang ada di Kota Tanjungpinang” dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan BPNT melalui E-Warong di Kota Tanjungpinang yang merupakan salah satu cara pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi proses implementasi program E-Warong dalam mendistribusikan BPNT di Kota Tanjungpinang.

Friedrich (Agustino, 2012:98) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Implementasi kebijakan ini merupakan tahapan penting dalam suatu kebijakan, tanpa adanya implementasi maka suatu kebijakan tersebut hanya akan menjadi suatu impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip (Wahab, 2012). Penelitian ini menggunakan model implementasi dari Van Meter dan Van Horn (Winarno 2012:161) konsep implementasi kebijakan telah dibatasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana

disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil.

Van meter dan Van Horn membagi ada enam variabel antara lain sebagai berikut :

- 1) Standar dan Tujuan Kebijakan. Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kegiatan.
- 2) Sumber Daya. Keberhasilan Proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.
- 3) Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan.
- 4) Karakteristik badan-badan pelaksana Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak

karakteristik badan-badan administrative yang telah mempengaruhi pencapaian kebijakan mereka.

- 5) Kecenderungan pelaksana (*Disposition*). Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan.
- 6) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian ini ingin menggali data dan informasi tentang tentang proses implementasi BPNT melalui E-Warong di Kota Tanjungpinang.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dan beberapa Pengelola E-Warong yang ada di Kota Tanjungpinang. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena lokasi tersebut merupakan hasil dari adanya program BPNT yang ada di Kota Tanjungpinang sebagai implementator program tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi yakni pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang menjadi obyek penulisan dan mencatat segala gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk mempelajari data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkesan dengan topik penulisan. Sebelum ke lapangan penulis harus menyusun pedoman observasi.

Metode wawancara yakni dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan penulisan. Wawancara yang dilakukan termasuk wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu dengan terlibat secara tatap muka dengan menggunakan wawancara yang bersifat semi struktur (*semistructure interview*).

C. Pembahasan

Dalam hal ini peneliti menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Model ini dipilih karena variabel-variabel dari model implementasi ini dapat menjelaskan secara komprehensif tentang proses implementasi BPNT melalui E-Warong di kota Tanjungpinang. Adapun variabel-variabel dari model implementasi ini adalah standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

1. Analisis Standar dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012), identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

Program E-Warong merupakan salah satu dari usaha pemerintah dalam

mengentaskan kemiskinan disetiap daerah dengan memberdayakan kelompok masyarakat. Masyarakat dapat mengembangkan kemampuan berwirausaha, dengan mengenalkan transaksi pelayanan secara elektronik menggunakan Kartu elektronik Keluarga Sejahtera (KKS), yang diberikan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dalam hal ini program E-Warong di Kota Tanjungpinang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Tetapi kurang berdayanya masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka yang merupakan tujuan dari berdirinya E-Warong. Tujuan E-Warong didirikan sebagai langkah untuk memberdayakan masyarakat miskin/KPM. Serta banyaknya agen yang berdiri membuat E-Warong menjadi kalah saing dalam berusaha. Hal tersebut membuat semangat para pengelola warong mulai luntur.

2. Analisis Sumber Daya

Keberhasilan Proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan keuangan (*financial*) yang dapat mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Sumber daya manusia ditujukan kepada siapa yang menjalankan pelaksanaan program di

lapangan dan sejauhmana pelaksana memahami tentang tugasnya. Sedangkan sumber daya keuangan (*financial*) dimaksudkan untuk mengetahui dari mana sumber dana yang diperoleh terkait program E-Warong.

Keadaan sumberdaya manusia yang cekatan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan BPNT melalui program E-Warong dalam hal ini dibawah naungan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Fakir Miskin yang berkoordinasi dengan organisasi Pemerintahan Daerah terkait. Sumber daya fasilitas dalam program E-Warong adalah rumah untuk mendirikan E-Warong, Mesin Electronic Data Capture (EDC) dan Kartu elektronik Keluarga Sejahtera (KKS) yang mesin EDC masih seringkali mengalami gangguan dan Kartu KPM yang hilang akan menjalani proses yang sangat lama. Sumber dana bantuan program E-Warong Kota Tanjungpinang dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berasal dari APBN. Serta dana Rp. 110.000 yang masuk ke setiap ATM KPM lancar setiap bulannya.

3. Analisis Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik dari agen pelaksana menjadi salah satu perhatian pusat. Pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam

pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya (Agustino, 2012).

Karakteristik dari agen pelaksana dalam hal ini meliputi siapa saja yang terlibat dalam suatu kebijakan atau program yang masuk di dalam struktur organisasi program E-Warong maupun diluar struktur program E-Warong. Adanya bentuk dukungan atau penolakan yang diberikan oleh pelaksana berdasarkan struktur organisasi program E-Warong ditingkat Kota maupun Kecamatan. Pelaksanaan program E-Warong di Kota Tanjungpinang melakukan kerjasama oleh setiap personil anggota pelaksanaan program E-Warong yang bertujuan mensukseskan program. Adanya keterbukaan informasi dalam kegiatan pendistribusian manfaat untuk KPM. Namun untuk komitmen pelaksana dinilai belum optimal karena tidak adanya dana anggaran dari Pemerintah Daerah menghambat Pendamping sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pendataan calon KPM.

4. Analisis Sikap (Disposition) para pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana yaitu kecenderungan para pelaksana

menunjuk pada karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan atau program. Sikap para implementor sangat dibutuhkan dalam menjalankan sebuah kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan kita harus bisa melihat seberapa besar kekuasaan dari pembuat kebijakan dan pelaksana program kebijakan sehingga semakin jelas tujuan yang ingin dicapai. Hanya saja jika semakin besar kepentingan yang mempengaruhi maka akan sedikit susah untuk mengimplementasikan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (Winarno,2012) mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan kebijakan yakni:

- a. Respon implementor terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kebijakan,
- b. Kognisi (pemahaman) para agen pelaksana terhadap kebijakan,
- c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.

Terkait sikap pelaksana program E-Warong yang dalam hal ini Dinas

Sosial, Pendamping Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pengelola E-Warong di Kota Tanjungpinang cukup optimal dengan menjalankan tupoksi mereka masing-masing. Dapat dilihat pendamping sosial sebagai pelaksana kebijakan selama ini terus aktif dalam memberikan informasi. Informasi yang diberikan terkait pertemuan, pengarahan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang jadwal pengambilan bantuan jika bantuan sudah masuk untuk diambil di E-Warong, serta informasi-informasi lainnya mengenai program E-Warong. Namun untuk dukungan serta komitmen bank penyalur yakni BNI belum sepenuhnya bertanggungjawab atas permasalahan yang terjadi saat bertransaksi.

5. Analisis Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana

Keberhasilandari implementasi kebijakan atau program dapat terwujud apabila komunikasi yang dijalin antara implementor dengan implementor lainnya (internal) dan juga kepada masyarakat (eksternal) berjalan dengan baik. Menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2008) agar komunikasi berjalan dengan efektif, maka badan-badan pelaksana harus mempunyai suatu pemahaman informasi yang sama. Hal tersebut harus dipahami oleh para individu (implementor). Implementasi sebuah program perlu dukungan dan

koordinasi dengan instansi lainnya. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antara instansi bagi keberhasilan suatu program dalam mencapai sasaran dan tujuan program.

Komunikasi yang dilakukan Pendamping sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yakni dengan sosialisasi dan edukasi. Komunikasi yang dilakukan terkait bantuan pangan non tunai bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan bantuan pangan non tunai, memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan dalam pelaksanaan bantuan pangan non tunai. Komunikasi dengan pihak Bank kurang terjalin, karena jika ada keluhan yang datang dari KPM pihak Bank selalu berbelit-belit dan tidak menyelesaikan masalah tersebut. Komunikasi yang dilakukan setingkat ketua pelaksana dengan bawahannya adalah dengan rapat koordinasi. Rapat koordinasi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang diterapkan dalam program E-Warong Kota Tanjungpinang.

6. Analisis Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial dan ekonomi ini sebenarnya menunjuk kondisi atau keadaan lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi

kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini menilai sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial dan ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Sekalipun dampak dari sistem-sistem ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, sistem-sistem ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

Jika dilihat dari lingkungan ekonomi dalam implementasi E-Warong Kota Tanjungpinang secara umum belum kondusif. Artinya adalah tujuan dibentuknya program E-Warong adalah untuk meningkatkan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Keluarga Penerima Manfaat yang dimaksud adalah keluarga yang tidak mampu yang berhak menerima bantuan. Untuk kondisi sosial lingkungan Kota Tanjungpinang, masyarakat sangat merespon adanya program, mereka sangat mendukung dengan adanya program ini. Karena dapat dilihat dari respon masyarakat setempat yang tidak mendapatkan program juga ikut membantu dalam proses pengadaan barang di E-Warong. Masyarakat ikut membantu

mengangkat dan menata barang-barang yang dibeli oleh para pihak pelaksana. Dukungan para pelaksana juga menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan program E-Warong dalam suatu kebijakan publik yang juga mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik di Kota Tanjungpinang. Pelaksanaan program E-Warong melibatkan pihak Kecamatan dan Kelurahan dibantu oleh Pendamping sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai bertujuan menggerakkan masyarakat agar aktif dalam proses pendaftaran peserta KPM.

7. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Proses Implementasi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Melalui E-Warong di Kota Tanjungpinang

Setiap implementasi sebuah kebijakan atau program, tentunya memiliki faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaannya. Begitu juga dengan implementasi program elektronik Warong gotong royong (E-Warong) di Kota Tanjungpinang. Setelah mengetahui faktor yang mempengaruhi tersebut, diharapkan mampu memberikan solusi yang dapat memperbaiki kinerja implementor dimasa yang akan datang. Hambatan pertama yang dihadapi yaitu dapat dilihat bahwa

agen-agen maupun RPK yang dibentuk oleh pihak Bank tersebar banyak membuat para pengelola E-Warong mengalami kesulitan dan penurunan saat bertransaksi. Agen 46 merupakan usaha perorangan(individu) dan sudah dikatakan dikelola dengan mayarakat yang sudah dikatakan mampu, berbeda dengan E-Warong yang dikelola dengan KPM itu sendiri dan lebih membutuhkan banyak peningkatan perekonomian.

Hambatan kedua yakni masalah akurasi data yang berkaitan dengan tidak semua masyarakat miskin yang terdaftar menjadi peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai. Masyarakat yang tergolong miskin di salah satu Kecamatan yakni Kecamatan Tanjungpinang Kota tidak semuanya terdaftar menjadi peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program E-Warong. Dengan demikian timbulah kecemburuan sosial yang dirasakan oleh masyarakat miskin yang ada.

Hambatan ketiga dalam implementasi program E-Warong Kota Tanjungpinang yaitu mengenai dana bantuan yang tidak keluar dalam rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai yang diberikan pemerintah setiap bulan. Masih ada beberapa KPM yang kartunya tidak bisa ditransaksikan karena saldo didalam

ATM tersebut tidak dapat dicairkan. Hal tersebut bukan hanya terjadi di satu kecamatan saja, melainkan dimasing-masing kecamatan ada tetapi jumlahnya tidak banyak. Hambatan keempat, terblokirnya uang dari E-Warong hasil transaksi para KPM. Padahal uang yang ada didalam tersebut sebagai perputaran modal untuk membelanjakan keperluan dalam E-Warong tersebut. Bukan hanya satu E-Warong saja dana tersebut diblokir, tetapi hampir semua E-Warong yang ada dikota Tanjungpinang mengalami hal serupa.

D. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini adalah Implementasi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) melalui E-Warong di Kota Tanjungpinang yang mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong). Dalam hal pendistribusian BPNT melalui E-Warong cukup optimal walaupun masih ada beberapa faktor yang masih menjadi hambatan untuk melaksanakan implementasi BPNT ini yaitu seperti agen-agen maupun RPK yang dibentuk oleh pihak Bank tersebar banyak di Kota Tanjungpinang membuat persaingan

penjualan dengan E-Warong para KPM. Akurasi data yang berkaitan dengan tidak semua masyarakat miskin yang terdaftar menjadi peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai. Hambatan dengan kartu KPM yang tidak bisa bertransaksi juga membuat jalannya bantuan tersebut belum optimal serta seringnya pemblokiran dana di setiap E-Warong oleh pihak Bank membuat semangat para pengelola E-Warong mulau sedikit luntur.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *“Dasar-Dasar Kebijakan Publik”*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2009. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik II*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- KEMENSOS. 2017. Bantuan Pangan Non Tunai. Diakses tanggal 23 September 2017. <https://www.kemsos.go.id/pa/ge/bantuan-pangan-non-tunai>
- Kholif, Khodziah Isnaini, I. N. dan S. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 709–714.
- Nugroho, Riant. 2003. *“Kebijakan Pubik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi”*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2014. *“Public*

- Policy Edisi 5*". Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui EWarung KUBE.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai
- Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- Pramesti, I. P., Utaminingsih, A., & Rahayu, R. K. (2018). implementasi Program E-Warong Kube Srikandi di Kota Malang Tahun 2017 (studi di Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen). *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 23–35.
- Purwanto, S. A., & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutuskan Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 16(2).
- Safitri, Dian Prima, dkk. 2016. *Teori Kebijakan Publik*. Cetakan 1. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Sengkey, N., Sendouw, R. H., & Mantiri, J. (2018). Implementasi Kebijakan Bantuan Beras Sejahtera (RASTRA) di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Civic Education*, 2(1), 65–71.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subarsono. 2005. "Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi", Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, E. dan R. R. (2018). Implementasi Kebijakan Program Beras Sejahtera. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 171–189.
- Wahab, Solichin A. 2008. "Pengantar Analisis Kebijakan Publik". Malang: UMM Press.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik; Teori Dan Proses (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Jakarta: Pt. BUKU SERU.

